

**KESIAPAN NEGARA-NEGARA CLMV (CAMBODIA, LAOS,
MYANMAR, VIETNAM) DALAM MENGHADAPI ASEAN *ECONOMIC*
*COMMUNITY***



SKRIPSI

Oleh:

AJI AKBAR SULAEMAN

E131 11 273

*Diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada departemen
Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KESIAPAN NEGARA-NEGARA CLMV (CAMBODIA, LAOS,
MYANMAR, VIETNAM) DALAM MENGHADAPI ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY

N A M A : AJI AKBAR SULAEMAN

N I M : E 131 11 273

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Makassar, 16 Agustus 2016

Mengetahui :

Pembimbing I,

Dr. H. Adi Suryadi B, MA
NIP. 19630217 199202 1 001

Pembimbing II,

Muh. Ashry Sallatu, S.IP, M.Si
NIP. 19790622 200812 1 002

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 19620102 199002 1 003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KESIAPAN NEGARA-NEGARA CLMV (CAMBODIA, LAOS,
MYANMAR, VIETNAM) DALAM MENGHADAPI ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY

N A M A : AJI AKBAR SULAEMAN

N I M : E 131 11 273

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin,
8 Agustus 2016

TIM EVALUASI

Ketua : Dr. H. Adi Suryadi B, MA

Sekretaris : Aswin Baharuddin, S.IP, MA

Anggota : 1. H. Darwis, MA, Ph.D

2. Agussalim, S.IP, MIRAP

3. Muh. Ashry Sallatu, S.IP, M.Si

The block contains four handwritten signatures, each on a dotted line, corresponding to the members of the evaluation team listed on the left. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

ABSTRAKSI

Aji Akbar Sulaeman, E131 11 273, skripsi yang berjudul : *Kesiapan Negara-negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community*, di bawah bimbingan H. Adi Suryadi B. selaku pembimbing I dan Muh. Ashry Sallatu sebagai pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kondisi kesiapan negara-negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam) dalam menghadapi ASEAN *Economic Community*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peluang dan tantangan yang dimiliki oleh CLMV di dalam ASEAN *Economic Community*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui data sekunder berupa buku, dokumen, jurnal dan berita. Seluruh data kemudian dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara CLMV telah siap untuk menghadapi ASEAN *Economic Community*. Adapun peluang yang dimiliki oleh CLMV adalah dengan adanya bantuan teknis dari negara-negara ASEAN. Peluang lain yang dimiliki yaitu pangsa pasar yang dimiliki oleh CLMV di Asia Tenggara. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh CLMV adalah kemampuan ekspor yang masih berupa *raw goods*. Negara-negara CLMV dituntut untuk mampu memproduksi serta mengeksport barang setengah jadi ataupun barang jadi, agar dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya.

ABSTRACT

Aji Akbar Sulaeman, E131 11 273, “Readiness of CLMV countries (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) Facing the ASEAN Economic Community”, under the guidance of H. Adi Suryadi B. as Advisor I and Muh. Ashry Sallatu as Advisor II, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin.

This study aims to describe how are the readiness of CLMV countries (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam) facing the ASEAN Economic Community. In addition, this study also aims to identify and explain the opportunities and challenges posed by CLMV in ASEAN Economic Community. The research method is using descriptive analytic. Data collecting techniques obtained through secondary data in the form of books, documents, journals and news. All data were analyzed qualitatively.

The results of this study showed that most of the CLMV countries are ready to face the ASEAN Economic Community. The opportunities that are owned by CLMV is with the technical assistance of the ASEAN countries. Another opportunity that owned that market share owned by CLMV in Southeast Asia. In addition, the challenges faced by CLMV is the ability to export is still a raw goods. CLMV countries are required to be able to produce and export the semi-finished goods or finished goods, in order to compete with other ASEAN countries.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis Asia Tenggara merupakan tidak lebih dari sebuah sub-benua. Terdiri dari sebelas negara berdaulat didalamnya. Negara-negara tersebut berada baik di Asia Tenggara Daratan (Indo-China), maupun yang berada di Kepulauan Melayu (*Malay Archipelago*)¹. Dalam perkembangannya, negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara ini mulai membentuk organisasi regional. Keinginan membentuk organisasi ataupun kerjasama regional oleh negara-negara di Asia Tenggara ini terlahir dari kesadaran kolektif untuk menuju kawasan kondisi kawasan yang jauh lebih baik. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi politik, keamanan, ekonomi hingga sosial yang ada dikawasan.

Sebelum terbentuknya ASEAN itu sendiri, negara-negara Asia Tenggara sebenarnya telah banyak membentuk organisasi yang skalanya regional, baik itu organisasi intra kawasan seperti *Association of Southeast Asia* (ASA), dan Malaya, Filipina dan Indonesia (Maphilindo). Maupun organisasi yang juga beranggotakan negara dari luar kawasan Asia Tenggara, seperti *Southeast Asia Treaty Organization* (SEATO) dan juga *Asia and Pacific Council* (ASPAC)². Belum lagi kesepakatan kerjasama regional Asia Tenggara lainnya. Yang tentunya memberi banyak pengalaman bagi negara-negara Asia Tenggara

¹ Edy Burmansyah, 2014, *Rezim Baru ASEAN*, Jakarta: Pustaka Sempu, hlm.29

²*Ibid.* Hlm 31

dalam berinteraksi dalam konteks regional kawasan sebelum akhirnya bersepakat untuk membentuk *Association of Southeast Asia Nation* (ASEAN).

Pada tahun 1967 ASEAN dideklarasikan oleh lima negara penggagasnya, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina melalui deklarasi Bangkok, yang diadakan di Bangkok Thailand. Deklarasi ini ditandatangani oleh masing-masing Menteri Luar negeri perwakilan setiap negara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Singapura oleh S. Rajaratman, Thailand oleh Thanat Koman, dan Filipina oleh Narciso Ramos. Sedangkan tujuan dibentuknya ASEAN sesuai dengan yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah³:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatana Bangsa-Bangsa;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadikan kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;

³Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2010, *Buku Menuju ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015*, hlm. 2

5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka;
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; dan
7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri.

Hingga sekarang, sepuluh negara Asia Tenggara telah bergabung dengan ASEAN. Brunei Darussalam bergabung tahun 1984, Vietnam bergabung tahun 1995, Laos dan Myanmar bergabung tahun 1997 dan terakhir Kamboja bergabung tahun 1999⁴.

Sebenarnya, ide awal terbentuknya ASEAN ini adalah untuk mencegah agar tidak terjadi konflik antara negara-negara anggota ASEAN, serta merupakan gerakan untuk membendung kekuatan Komunisme agar tidak menyebar hingga ke Kawasan Asia Tenggara⁵. Namun kerjasama ekonomi juga tak kalah menjadi penting bagi negara-negara anggota ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya kesepakatan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh ASEAN. Seperti kesepakatan *Common Effective Preferential Tariff – ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) yang ditanda tangani tahun

⁴*Ibid*

⁵*Log Cit*, hlm. 32

1992, *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) pada tahun 1995 dan *ASEAN Investment Area* (AIA)⁶.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 tanggal 15 desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, para pemimpin ASEAN mengesahkan ASEAN VISION 2020 yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya-saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. Kemudian tahun 2003, pada KTT ASEAN di Bali, Indonesia, para pemimpin ASEAN memutakhirkan ASEAN VISION 2020 menjadi *ASEAN Community* yang waktu pengimplementasiannya juga dipercepat menjadi tahun 2015, yang memiliki 3 pilar yaitu: (1) *ASEAN Political-Security Community*, (2) *ASEAN Economic Community*, dan (3) *ASEAN Socio-Cultural Community*.

Salah satu pilar yang kemudian menjadi penting untuk di bangun oleh negara-negara ASEAN yaitu pilar *ASEAN Economic Community*. Menjadi penting sebab *ASEAN Economic Community* (AEC) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh ASEAN untuk mewujudkan suatu integrasi kawasan khususnya di bidang ekonomi. AEC ditujukan untuk mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara secara penuh sebagai pasar tunggal dan basis produksi, melalui pembebasan aliran barang, jasa, investasi, lalu lintas modal serta tenaga ahli. AEC ini juga di bangun dengna empat pilar utamanya, yaitu:

1. *Single market and Production Base*

⁶*Op Cit*,

ASEAN akan menjadi sebuah entitas pasar. Dan juga setiap negara akan menjadi pemain atau pedagang yang menawarkan barang dan jasa kepada seluruh masyarakat ASEAN itu sendiri. Sehingga setiap negara harus memiliki basis produksi yang kuat dan berkualitas. *Single market and production base* ini memiliki lima elemen utama, yaitu bebas barang (*Free flow of goods*), jasa (*free flow of services*), investasi (*free flow of investment*), modal (*free flow of capital*), dan tenaga kerja terampil (*free flow of skilled labour*).

2. *High Competitiveness*

Sebagai ajang untuk meningkatkan daya saing kawasan, sekaligus untuk mendongkrak kekuatan menghadapi persaingan global.

3. *Equitable Growth*

Upaya bersama untuk menyejahterakan seluruh anggotanya.

4. *Economic Integration to Global Economic*

Untuk mengintegrasikan perekonomian kawasan dengan perekonomian global dengan harapan mampu menawarkan diri dengan nilai yang lebih tinggi.

Memasuki akhir tahun 2015, menandakan bahwa negara- negara ASEAN akan segera menyambut masuknya era ASEAN *Community*, termasuk pula ASEAN *Economic Community* 2015 (AEC). Negara-negara anggota ASEAN sejatinya masing-masing telah mempersiapkan diri mereka memasuki era tersebut. Namun, petinggi-petinggi ASEAN kemudian melihat adanya kesenjangan pembangunan yang terjadi di negara Kamboja, Laos, Myanmar

dan Vietnam (CLMV)⁷. Kondisi kesenjangan ini memengaruhi kesiapan negara CLMV tersebut untuk memasuki AEC 2015. Dan menjadi sulit bagi negara-negara CLMV untuk mengikuti laju pertumbuhan ekonomi ke-enam anggota lainnya dengan kondisinya saat ini jika AEC 2015 telah betul-betul 100% di jalankan. Akhirnya demi mengakomodasi niat baik negara-negara CLMV tanpa mengeliminasi mereka dari AEC 2015, seluruh anggota ASEAN kemudian bersepakat memberikan fleksibilitas implementasi hingga tahun 2018⁸. Agar negara-negara CLMV dapat menyamai negara ASEAN-6, dan mencapai kepentingan nasionalnya dengan meningkatkan perekonomiannya.

Dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi AEC 2015 negara-negara ASEAN memiliki pedoman. Yaitu AEC *Blue Print* yang di sepakati tahun 2007. Pengimplementasian AEC *Blue Print* 2015 lebih menekankan kepada pemerintah seluruh negara anggota ASEAN secara umum, dan juga negara-negara CLMV secara khusus. Peran negara ataupun pemerintah dalam penghapusan tarif barang masuk dan keluar negaranya akan diberlakukan secara bertahap, dari sejak di sepakatnya AEC *Blue Print* pada tahun 2007, hingga akhir tahun 2015 bagi negara ASEAN-6, dan bagi negara CLMV hingga tahun 2018. Pada tahun yang ditargetkan, negara-negara CLMV telah menghapuskan 100% hambatan tarif dan non tarif bagi arus keluar masuknya barang di negaranya.

⁷Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2009, *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN*, hlm. 7

⁸*Ibid.* hlm. 9

Secara umum, kerajaan Kamboja atau nama resmi internasionalnya yaitu *Kingdom of Cambodia*. Sebuah negara dengan bentuk monarki konstitusional yang merdeka tahun 1953. Karena bentuk negaranya yang monarki, Kamboja di kepalai oleh seorang raja, namun Kepala pemerintahan dan yang menjalankan pemerintahan berada di bawah kendali Perdana Menteri. Letak Ibu Kota negaranya berada di Phnom Penh. Melihat ke sisi perekonomian negara ini, hingga saat ini sektor pertanian atau agrikultural masih menjadi sektor andalan yang dimiliki Kamboja. Tetapi perkembangan pariwisata serta industri garmen perlahan mulai menjadi komoditas utama negara ini. Tampaknya produk ketiga sektor utama yang disebutkan di atas yang dimiliki Kamboja akan banyak bersaing dalam pasar bebas ASEAN *Economic Community* nantinya.

Myanmar juga merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang bergabung tahun 1997. Negara yang beribu kotakan Yangon ini memiliki nama resmi internasional *The Union of Myanmar*, atau Republik Persatuan Myanmar. Namun negara ini juga dikenal dengan nama Burma. Dan dikepalai oleh seorang Presiden. Myanmar merupakan salah satu negara yang memiliki pengalaman pahit mengenai pemerintahan yang dikuasai oleh militer. Polemik kekuasaan di Myanmar sedikit banyak memengaruhi kondisi ekonomi dan pembangunan dinegaranya. Hingga saat ini, Myanmar memiliki komoditi andalan dari sektor pertanian. Sektor pertambangan logam dan mineral mentah juga menjadi komoditas andalan yang dimiliki. Kebijakan menarik investasi

asing menjadi fokus Myanmar saat ini. Bahkan negara ini berencana untuk menerapkan kebijakan delapan tahun bebas pajak bagi investor asing.

Selanjutnya adalah negara Laos atau Republik Demokratik Rakyat Laos. Sebuah negara yang beribukotakan di Vientiane. Kepala Pemerintahan di kepalai oleh Perdana Menteri dengan sistem pemerintahan republik. Sama dengan Myanmar, Laos bergabung dengan ASEAN pada tahun 1997. Secara kontur geografis, negara Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki lautan. Daratan, hutan serta pegunungan merupakan sebagian besar kondisi geografis di Laos. Dengan kondisi seperti itu, pertanian kemudian menjadi sektor komoditi unggulan yang dimiliki oleh Laos. Sektor Pariwisata juga menjadi sektor unggulan disana.

Vietnam adalah negara terakhir dalam kategori CLMV dalam AEC 2015. Vietnam yang beribu kotakan di Hanoi ini masuk sebagai anggota ASEAN pada tahun 1995. Memiliki sistem pemerintahan Republik Sosialis, senada dengan nama Resmi internasionalnya yaitu Republik Sosialis Vietnam. Dan dikepalai oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Pertanian serta perkebunan masih menjadi komoditas unggul yang dimiliki oleh negara Vietnam. Sektor pariwisata selanjutnya menjadi sektor yang mulai berkembang pesat di Vietnam. Pasca perang Vietnam, perekonomian Vietnam menjadi lesu akibat dijatuhinya Vietnam hukuman embargo ekonomi oleh Amerika dengan sebagian besar negara-negara Eropa. Baru pada tahun 1990-an Vietnam mulai menggenjot perencanaan pembangunan perekonomiannya, termasuk kepemilikan swasta.

Ada banyak kesamaan latar belakang yang dimiliki oleh negara-negara CLMV tersebut diatas. Dari segi perpolitikan yang sama-sama memiliki masalah, seperti junta militer di Myanmar, serta masih adanya sistem sosialis komunis di Vietnam. Kesamaan sektor komoditas unggulan juga terlihat jelas, yaitu masih pada sektor pertanian. Sementara untuk menjadi negara maju, sektor industri sudah merupakan sektor andalan yang harus dimiliki.

Dalam integrasi, baik itu integrasi secara global maupun dalam kawasan, setiap aktor hubungan internasional sejatinya saling berpengaruh satu sama lain. Kondisi sebuah negara akan memengaruhi kondisi negara yang lain. Hal ini berlaku pula pada proses integrasi kawasan dalam ASEAN, atau AEC 2015 secara spesifik. Faktor kesiapan negara-negara anggotanya dalam menghadapi AEC 2015 sejatinya akan memengaruhi proses kerja sama serta efektifitas AEC 2015. Sebab keseluruhan negara anggota telah terintegrasi.

Akselerasi persiapan negara-negara CLMV dalam menghadapi AEC, akan makin cepat terwujud jika negara anggota lain memiliki andil untuk membantu persiapan negara-negara CLMV. Peran enam negara anggota yang lain menjadi penting bagi akselerasi CLMV. Begitu pula sebaliknya, kesiapan CLMV menjadi penting bagi ke-enam negara anggota yang lain, agar pasar bebas yang diciptakan oleh AEC nantinya akan menjadi efektif, jika seluruh negara anggotanya telah siap untuk bertarung didalamnya. Proses integrasi inilah yang membawa negara-negara anggota AEC terlibat dalam suatu hubungan *interdependencia*.

Meneliti serta membahas kesiapan sebuah negara ataupun beberapa negara untuk masuk kedalam pusaran regionalisme yang terintegrasi, atau bahkan globalisasi secara lebih luas sangatlah menarik, karena hal ini menyangkut kepada efektifitas berjalannya integrasi tersebut. Integrasi yang diimplementasikan dalam sebuah kesepakatan regional sejatinya tidak akan berhasil jika ada negara-negara anggotanya yang belum siap menghadapi integrasi tersebut. Kerja sama regional dalam konteks ini ASEAN *Economic Community*, bukan hanya berbicara kerja sama untuk membentuk sebuah *Free Trade Area*, tetapi disaat bersamaan juga merupakan wadah persaingan bagi negara-negara yang ada didalamnya.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Hingga fleksibilitas batas tahun yang diberikan berakhir, negara-negara CLMV harus dapat mengimplementasikan kesepakatan AEC secara 100%. Secara implisit disebutkan dalam *Asean Economic Blue Print*, negara-negara CLMV dapat mempersiapkan negaranya pada point Aliran Bebas Barang. Termasuk di dalamnya pengimplementasian penghapusan hambatan tarif dan non tarif⁹. Oleh karena itu penulis memfokuskan meneliti bagaimana kesiapan negara-negara CLMV pada sektor penghapusan hambatan tarif dan non tarif dalam periode waktu tahun di sepakatnya AEC Blueprint, yaitu tahun 2007 hingga akhir tahun 2015.

⁹*Ibid.* Hlm. 8

Berdasarkan pemaparan masalah dan batasan di atas, maka skripsi ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Domestik CLMV dalam mempersiapkan diri menghadapi *ASEAN Economic Community* 2015 khususnya dalam penghapusan hambatan tarif dan non tarif?
2. Bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara CLMV dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* khususnya dalam penghapusan hambatan tarif dan non tarif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan domestik di negara-negara Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam dalam penghapusan hambatan tarif dan non tarif dalam *ASEAN Economic Community*.
2. Untuk mengetahui apa saja peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam dalam penghapusan hambatan tarif dan non tarif dalam *ASEAN Economic Community*.

Penelitian ini memiliki manfaat praktis dan kegunaan akademis:

1. Penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis atas informasi tentang kebijakan domestik negara-negara Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam

dalam penghapusan hambatan tarif dan non tarif dalam ASEAN *Economic Community*.

2. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengetahui apa saja peluang yang akan diperoleh serta tantangan yang akan dihadapi oleh negara-negara Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam dalam penghapusan hambatan tarif dan non tarif dalam ASEAN *Economic Community*.

D. Kerangka Konseptual

Interaksi antar negara dengan negara lain yang paling dekat secara geografis adalah dengan negara-negara satu region. Istilah interaksi antar negara ataupun aktor internasional lain yang meliputi sebuah kawasan disebut regionalisme. Adapun definisi regionalisme menurut Mansbach (1973) :

Pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional¹⁰.

Selain dari pada basis kedekatan geografis, ada pula kriteria kesamaan oleh beberapa negara sehingga ia dapat disebut sebagai sebuah kawasan. salah satunya adalah kriteria ekonomi. Yaitu mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi, seperti GNP, dan output industri¹¹.

Adanya kesadaran bahwa dalam sebuah kawasan, negara-negara memiliki kesamaan, tingkatan lanjut hubungan mereka dapat berupa kerjasama regional

¹⁰Sudirman Arfin, Deasy Sylvia, Nuraeni S, 2010, *Regionalisme Dalam Studi Ilmu hubungan Internasional*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm. 1

¹¹. *Ibid*; hlm. 2

ataupun membentuk sebuah organisasi regional. Kerja sama regional memiliki beragam bentuk, misalnya kerja sama ekonomi yang mengacu pada tatanan meramalkan atau mengangankan terciptanya suatu derajat keistimewaan komersil¹².

Dengan didahului berbagai bentuk kerja sama dalam sebuah kawasan, membentuk sebuah organisasi regional nantinya akan lebih komprehensif mengingat banyaknya aspek yang dapat dipenuhi dalam sebuah organisasi regional. Organisasi regional merupakan suatu bagian dari dunia yang sama-sama diikat oleh kesamaan tujuan berdasarkan ikatan geografis, sosial, budaya, ekonomi ataupun politik dan struktur formal yang memberikan arahan pada berbagai kesepakatan intergovernmental secara formal¹³.

Kesemua bentuk interaksi yang telah dipaparkan diatas, pada akhirnya akan membawa negara-negara dalam sebuah kawasan tersebut kepada sebuah muara interaksi yang disebut integrasi. Regionalisme merupakan langkah awal menuju sebuah integrasi kawasan, bahkan global. Pencapaian integrasi akan mempermudah negara-negara yang terlibat untuk memperoleh kepentingan terbesar mengapa sebuah kawasan memerlukan adanya integrasi, yaitu memaksimalkan potensi ekonomi mereka. Seperti asumsi awal liberalisme ekonomi, mekanisme pasar yang bebas akan membawa negara pada kemakmuran masyarakatnya secara ekonomi.

Bergabungnya sebuah negara dalam kerjasama regional ataupun organisasi regional, berarti secara sadar negara tersebut harus tunduk dan patuh kepada

¹² *Ibid*; hlm. 79

¹³ *Ibid*; hlm. 80

aturan-aturan yang disepakati dalam kerangka kerjasama tersebut. Serta dilatar belakangi berbagai kepentingan masing-masing negara yang menjadi alasan mengapa negara tersebut turut bergabung dalam sebuah kerangka kerjasama regional maupun internasional. Menyepakati dan mematuhi peraturan yang telah disepakati dalam kerangka kerja sama menjadi penting sebab dengan begitulah tujuan bersama dapat dicapai.

Berbicara mengenai negara, kita tak akan lepas dari bagaimana negara tersebut berjuang untuk meraih kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional setiap negara berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi karena proses perumusan kepentingan nasional tersebut secara teori terbangun atas dua pendekatan.

Menurut Dewi Fortuna Anwar, dalam buku *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik* mengatakan kepentingan nasional didefinisikan atas pendekatan “objektif” dan pandangan “subjektif”¹⁴. Pandangan objektif melihat kepentingan nasional sebagai suatu yang dapat dirumuskan secara jelas dengan menggunakan kriteria yang objektif, sehingga rumusan kepentingan nasional suatu negara akan cenderung konstan. Sedangkan pandangan subjektif melihat kepentingan nasional merupakan sesuatu yang selalu dapat berubah-ubah, sesuai dengan pandangan subjektif dari para pembuat keputusan suatu negara.

Pandangan di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Frankel (1970):

¹⁴ Genewati Wuryandari *and all*, 2008, *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik: Pustaka Pelajar*, Jakarta; Pustaka Pelajar, hlm. 15

kepentingan nasional yang objektif adalah mereka yang berhubungan dengan negara-bangsa dimana kebijakan luar negeri menjadi tujuan utama, yang berdiri sendiri namun dirumuskan oleh para pembuat kebijakan melalui perhitungan yang sistematis. Adapun kepentingan permanen yaitu terdiri dari faktor-faktor seperti geografi, sejarah, tetangga, sumber daya, jumlah populasi serta etnis. Kepentingan nasional subjektif adalah kepentingan yang bergantung pada pemerintah yang berkuasa pada saat itu, atau elit-elit politik, termasuk didalamnya agama serta identitas kelas. kepentingan itu berlandaskan pada interpretasi dari subyek yang merubah kepentingan tersebut, seperti pemerintah itu sendiri¹⁵.

Sebuah pemerintahan atau pemimpin yang memiliki orientasi politik liberal, maka ia akan memandang bahwa ekonomi pasar merupakan sumber utama kemajuan, kerjasama, dan kesejahteraan. Dengan hal ini maka ia melihat bahwa ekonomi merupakan faktor penting yang harus dipenuhi negaranya untuk mencapai kemajuan serta kesejahteraan. Liberalisme menganggap bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional adalah dengan membiarkan pertukaran antar individu dalam ekonomi domestik dan internasional secara bebas dan tidak usah dibatasi. Pasar bebas kemudian menjadi hal yang mutlak dijalankan oleh pengambil kebijakan untuk meraih kesejahteraan nasional. Dan melalui mekanisme pasarlah, masalah-masalah sosial kemudian dapat teratasi.

Untuk mencapai pasar bebas yang optimal, negara seharusnya membiarkan perdagangan bebas terjadi secara alami dalam harmoni. Membiarkan individu-individu yang rasional untuk mencari keuntungannya sendiri didalam perdagangan bebas. Individu kemudian dikatakan rasional sebab individu pasti melakukan kalkulasi untung rugi atas berbagai pilihan

¹⁵Scott Burchill, 2005, *The National Interest in International Relations Theory*, London; Palgrave Macmillan, hlm. 3

yang ada dan memilah bahkan menciptakan keuntungannya demi menghasilkan kepuasan subyektif yang paling tinggi.

Seharusnya negara mendukung terbangunnya perdagangan bebas yang merupakan instrumen penting terbangunnya pasar bebas. Dengan menyediakan fondasi bagi bekerjanya sistem pasar, serta mereduksi segala regulasi ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi atau perdagangan bebas. Mengubah peraturan (deregulasi) di sektor perekonomian yang dapat memperlancar perdagangan bebas seperti, menjamin keamanan, kepastian hukum, melindungi hak milik, mencegah persaingan yang tidak sehat atau mencegah monopoli dalam pasar, menyelenggarakan pendidikan, membangun infrastruktur, penghampusan hambatan tarif dan non-tarif, kelonggaran pajak, menghilangkan proteksi ekonomi, merupakan serangkaian contoh kebijakan yang harus di ambil negara demi terbangunnya perdagangan bebas yang *fair* menurut pandangan kaum liberal. Adapun sektor-sektor yang terkena deregulasi tersebut, seperti yang telah dirumuskan oleh WTO dan IMF dalam empat pilar yaitu:

1. *Free Flow of Goods*
2. *Free Flow of Investment*
3. *Free Flow of Service*
4. *Free Flow of Labour*

Berdasarkan empat pilar tersebut diatas, peranan negara dibatasi hanya sebagai pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar bebas. Disini, negara hanya berperan sebagai pembuat aturan yang menjamin terbentuknya

pasar dan perdagangan bebas, dan menegakkan aturan tersebut. Selanjutnya, mekanisme pasarlah yang kemudian akan menggerakkan perekonomian hingga kepada kesejahteraan sosial¹⁶.

Ada beragam cara bagi suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Hal ini sangat berkaitan dengan arah Politik Luar Negerinya. Salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan negara lain. Baik itu di tingkatan regional ataupun secara global.

Dalam konteks ASEAN, negara-negara anggota merasa memiliki banyak kesamaan dan nasib. Kedekatan secara geografis telah dimiliki oleh negara-negara anggotanya, kesamaan latar belakang sejarah kemerdekaan (sebagian besar negara bekas jajahan) dan faktor ekonomi dimana menginginkan suatu integrasi kawasan. kesemuanya telah terwadahi dengan terbentuknya ASEAN Economic Community yang tujuannya jelas untuk meningkatkan GNP serta mengembangkan output industri masing-masing negara anggotanya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis mengenai kesiapan negara-negara CLMV dalam menghadapi AEC 2015.

2. Jenis dan Sumber Data

¹⁶Salamuddin Daeng, 2008, *Makro Ekonomi Minus. Sebuah Tinjauan Kritis Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Institute for Global Justice, hlm. 65

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen artikel, majalah, surat kabar dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa telaah pustaka (*library research*) dan studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas berupa buku, dokumen, jurnal, artikel, majalah atau surat kabar.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa kemudian disimpulkan sedangkan data kuantitatif digunakan sebagai data pelengkap untuk menjelaskan kualitatif.

5. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pola deduktif. Pola ini menggambarkan permasalahan yang diteliti secara umum, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dengan menampilkan data-data serta analisa penulis.

BAB III

GAMBARAN KONDISI DOMESTIK CLMV (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR, VIETNAM) SEBELUM DAN SAAT IMPLEMENTASI AEC *BLUE PRINT*

Pada tahun 2007, yaitu tahun dimana AEC *Blue Print* disahkan, negara-negara ASEAN kemudian berlomba-lomba untuk mempersiapkan dirinya sebelum sepenuhnya jatuh pada putaran perdagangan bebas AEC pada tahun 2015. Posisi AEC *Blue Print* ini pula sangat penting bagi negara-negara anggota ASEAN, sebab dokumen ini yang menjadi pedoman bergerak negara-negara ASEAN dalam mempersiapkan diri. Didalamnya diatur hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai targetan tertentu disetiap tahunnya. Memenuhi target yang ditetapkan, artinya semakin siap pula suatu negara dalam bersaing di AEC 2015.

Hal tersebut berlaku pula bagi negara CLMV atau Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam. Namun, fleksibilitas penerapan diberikan kepada empat negara ini hingga tahun 2018. Dengan melihat kondisi awal mereka yang mengalami disparitas perkembangan ekonomi dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya. Fleksibilitas ini di berlakukan khususnya pada penerapan pilar pertama dalam AEC, yaitu *Single Market and Production Base*, pada point *Free Flow of Goods* atau aliran bebas barang.

Free flow of goods merupakan pilar pertama dalam ASEAN *Economic Community*. Pilar ini memaparkan bagaimana nantinya ASEAN akan menjadi

area perdagangan bebas. Untuk mewujudkan perdagangan bebas tersebut, setiap negara di Asia Tenggara harus menghapuskan hambatan perdagangan yang ada di negara mereka. Hambatan yang dimaksud terbagi atas dua, yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif.

Adapun peran *AEC Blue Print* di sini adalah memberikan pedoman bagi negara-negara ASEAN dalam prosesnya mengeliminasi kedua hambatan tersebut di atas. Dengan mengeliminasi hambatan-hambatan perdagangan di atas, maka area pasar bebas dalam ASEAN akan berlaku sepenuhnya. Dalam hambatan tarif di eliminasi hingga ke titik terendahnya, yaitu 0% pada setiap barang. Dan dalam hambatan non tarif, barang dibuat semudah mungkin untuk dapat masuk ke dalam pasar luar negeri.

A. Gambaran Kondisi Ekonomi CLMV pada Tahun Pengesahan *AEC Blue Print*

Flexibilitas yang diberikan kepada negara-negara CLMV, didasarkan pada pertimbangan disparitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara tersebut jika dibandingkan dengan enam anggota yang lain. Untuk lebih komprehensif melihat laju pertumbuhan dan pencapaian kesiapan, melihat kondisi awal negara-negara CLMV pada saat *AEC Blue Print* dijalankan akan menjadi tolak ukur dasar yang sangat penting.

Pada tahun 2007, negara-negara CLMV telah memberlakukan pemberian tarif barang masuk ke dalam negerinya yang berlaku untuk negara anggota

ASEAN sebesar 4.4%. Dimana tarif tersebut telah turun sebesar 0.15% di bandingkan tahun 2006 sebesar 4.65%. Dibandingkan dengan pemberlakuan pemberian tarif barang masuk di negara ASEAN-6 (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina) yang telah turun hingga angka 1.59%¹⁷. Persentase tarif ini diambil dari harga barang yang akan masuk ke dalam negara tujuan import.

Sementara pemberlakuan hambatan non-tarif (*non-tariff barriers*), sepanjang tahun 2007 negara-negara CLMV masih melakukan identifikasi, hambatan non-tarif dari sektor mana yang akan diberlakukan. *ASEAN NTB (non-tariff barriers) Elimination Work Programme* adalah lanjutan fokus negara-negara anggota ASEAN yang dilakukan setelah penghapusan hambatan tarif¹⁸. Hal ini bukan hanya berlaku bagi negara-negara CLMV, tetapi juga bagi ASEAN-6. Untuk mengefektifkan proses penghapusan hambatan non-tarif ini, terlebih dahulu dilakukan identifikasi hambatan non-tarif mana yang paling memengaruhi proses perdagangan intra ASEAN.

Setelah dilakukan proses identifikasi bersumber dari *ASEAN Chambers of Commerce & Industry* (ASEAN-CCI), UNCTAD's *Trade Analysis and Information System* (TRAINS), dan usulan dari negara anggota ASEAN itu sendiri, di temukan beberapa point penting hambatan non-tariff mana yang penting untuk dihapuskan, yaitu *custom surcharge* (biaya tambahan bea cukai), *technical measures and products characteristic requirements* (persyaratan teknis

¹⁷ The Twenty-First Meeting of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council (http://asean.org/?static_post=the-twenty-first-meeting-of-the-asean-free-trade-area-afta-council-makati-city-philippines-23-august-2007-joint-media-statement), diakses tanggal 26 Juni 2016

¹⁸ *Ibid*,

dan ketentuan serta karakteristik produk), dan *monopolistic measures* (ketentuan monopoli)¹⁹.

Dalam hasil identifikasi, di temukan bahwa biaya tambahan bea cukai diterapkan untuk sekitar 2.683 pos tarif. Langkah-langkah teknis dan persyaratan teknis serta karakteristik produk diterapkankan untuk lebih dari 975 pos tarif. Serta langkah-langkah monopolistik adalah proses pelibatan kelompok perdagangan atau importir tertentu dalam proses perdagangan antar negara.

Berikut adalah pos-pos hambatan non-tarif yang harus dihapuskan oleh negara-negara anggota ASEAN.

Tabel 3.1:

Pos-pos Penghapusan Hambatan Non-Tariff ASEAN

<i>Non-tariff Barrier</i>	<i>Number of Tariff Line</i>
<i>Customs surcharges</i>	2,683
<i>Additional Charges</i>	126
<i>Single Channel for Imports</i>	65
<i>State-trading Administration</i>	10
<i>Technical Measures</i>	568
<i>Product Characteristic Requirement</i>	407
<i>Marketing Requirements</i>	3
<i>Technical Regulations</i>	3

Sumber: ASEAN, (http://asean.org/?static_post=non-tariff-barriers)

Dari keseluruhan pos-pos hambatan non tarif di atas, AEC *Blue Print* hanya akan fokus kepada pos-pos yang memiliki jumlah pos tarif yang tinggi. Yaitu *Custom surcharges*, *Technical Measures* dan *Products Charasteristic Requirements*.

¹⁹ Non-Tariff Barriers (http://asean.org/?static_post=non-tariff-barriers), diakses pada tanggal 13 Mei 2016

Sebelum diimplementasikannya kebijakan sektor perdagangan di atas, yang tertuang di dalam *AEC Blue Print*, kita terlebih dahulu dapat melihat seberapa besar angka perdagangan yang diperoleh oleh CLMV pada saat *AEC Blue Print* akan dilaksanakan bersama. Yang nantinya akan dikomparasikan dengan angka perdagangan pada saat *AEC Blue Print* dijalankan. Angka hasil perdagangan tersebut akan di jelaskan oleh tabel di bawah ini:

Tabel 3.2:

Angka Perdagangan CLMV di Intra-ASEAN (dalam Juta US Dollar) tahun 2007

Negara	Eksport	Import	Total
Cambodia	251	1,283	1,534
Laos	257	576	8,33
Myanmar	3,428	1,413	4,841
Vietnam	7,731	15,444	23,175

Sumber : ASEAN International Merchandise Trade Statistic Yearbook 2014, (http://asean.org/?static_post=asean-international-merchandise-trade-statistics-yearbook-2014)

Dari angka-angka hasil perdagangan di atas, kita dapat melihat bahwa hampir semua negara-negara CLMV telah mampu melakukan total transaksi dagang dalam intra ASEAN di atas 1,000 US Dollar. Hanya Laos lah yang belum menyentuh angka tersebut. Namun, dengan diimplementasikannya *AEC Blue Print* di seluruh negara-negara CLMV diharapkan laju pertukaran barang antar negara dapat menjadi lancar, sehingga total transaksi dagang juga dapat meningkat.

B. Implementasi *AEC Blue Print* di Tingkat Domestik CLMV

Meskipun negara-negara CLMV diberikan fleksibilitas hingga tahun 2018, akan tetapi mereka juga tetap dapat mengimplementasikan *AEC Blue Print*.

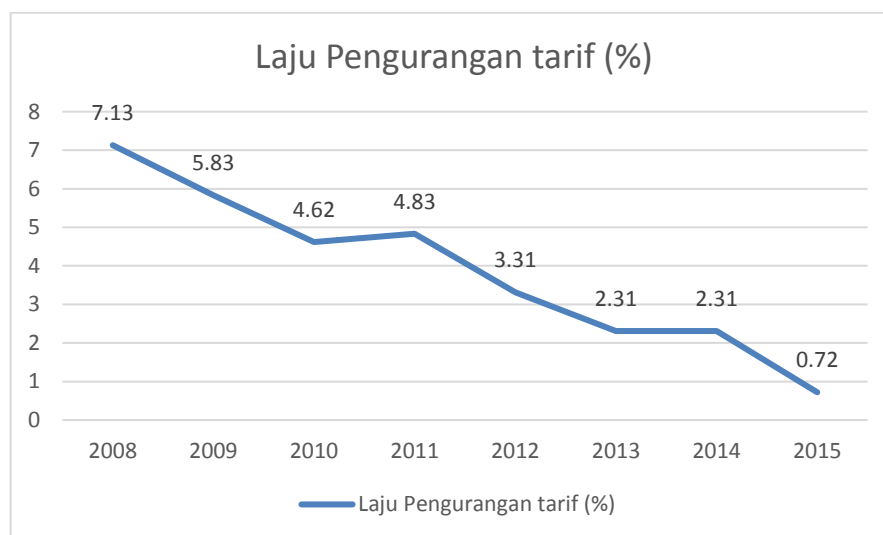
Pengimplementasian tersebut terus dilakukan secara berkesinambungan hingga tahun 2018.

a. Cambodia

Berikut dibawah ini, merupakan statistik laju pengurangan tarif barang yang masuk ke negara Kamboja:

Grafik 3.1:

Laju Pengurangan Hambatan Tarif Cambodia 2008-2015



Sumber: CEPT-ATIGA Tariff Rates 1993-2015, (http://www.asean.org/storage/images/2015/april/information_on_average_tariffs/average%20CEPT-ATIGA%20tariff%20rates%201993-2015_1.pdf)

Dari data yang di paparkan di atas, kita dapat melihat bahwa Kamboja telah menerapkan pengurangan tarif yang begitu signifikan di tiga tahun pertama. Akan tetapi di tahun 2011, tarif kemudian dinaikkan sebesar 0,11% ke angka 4,83% dari tahun sebelumnya yaitu 4,62%. Tetapi di tahun selanjutnya, hambatan tarif terus tetap di turunkan meskipun tidak signifikan di tiga tahun pertamanya.

Sementara untuk hambatan non-tarif, hingga tahun 2014 negara Kamboja telah mengimplementasikan ketetapan yaitu setiap proses perdagangan, baik itu

import maupun ekspor telah menerapkan sistem ASYCUDA (*Automated System on Customs Data*²⁰). Adalah sebuah sistem pendataan administratif elektronik melalui satu pintu. Segala berkas kepabeanan suatu barang yang akan masuk ataupun keluar dari negara Cambodia harus terdata melalui sistem ini.

Cambodia pula telah menerapkan kontrol terhadap barang import yang akan masuk kenegaranya melalui pemeriksaan *Prohibited and Restricted Goods*. Adapun daftar barang yang termasuk di larang dan dibatasi untuk masuk ke dalam Cambodia telah di atur sepenuhnya dalam lampiran tertentu yang dibuat oleh *Ministry of Economy and Finance* Cambodia. Di dalam lampiran ini terdapat daftar barang yang termasuk terlarang dan dibatasi serta tindakan yang harus diambil bagi setiap barang.

Cambodia juga telah menetapkan 13 perusahaan sebagai *the best trader*. Adalah perusahaan yang di percaya sebagai broker untuk menyalurkan barang masuk ataupun keluar dari negaranya. Namun, importir tidak dibatasi melakukan proses broker hanya melalui 13 broker ini saja, tetapi Cambodia juga masih membuka kesempatan bagi yang ingin menjadi broker dengan terlebih dahulu melalui *Selection Criteria Package for Best Trader Group*. Didalam proses seleksi ini dipaparkan kriteria untuk masuk kedalam daftar *Best Trader Group* (BTG) di Cambodia.

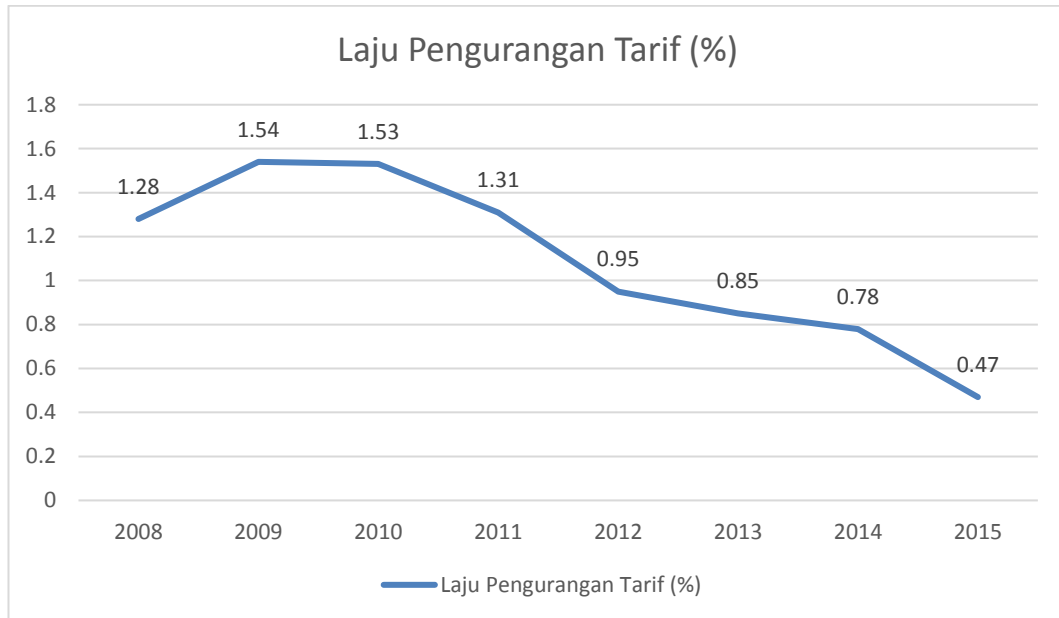
b. Laos

Untuk informasi mengenai laju pengurangan hambatan tarif masuknya barang ke negara Laos, dapat dilihat melalui grafik di bawah ini:

²⁰ ASYCUDA Project, (<http://www.customs.gov.kh/trade-facilitation/customs-automation/>), diakses tanggal 8 Mei 2016

Grafik 3.2:

Laju Pengurangan Hambatan Tarif Lao PDR 2008-2015



Sumber : CEPT CEPT-ATIGA Tariff Rates 1993-2015, (http://www.asean.org/storage/images/2015/april/information_on_average_tariffs/average%20CEPT-ATIGA%20tariff%20rates%201993-2015_1.pdf)

Kita dapat melihat dari data di atas, bahwa tahun kedua menerapkan *AEC Blue Print* Laos sempat menaikkan tarif barang masuk kenegaranya. Namun di tahun-tahun selanjutnya, tarif dapat dieliminasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Sementara untuk permasalahan hambatan Non Tarif, yang mengatur mengenai permasalahan import barang masuk ke Laos, memberlakukan alur birokrasi sebagai berikut²¹:

²¹ Commercial Imports, (<http://laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=10>), diakses pada 4 Mei 2016

1. *Registration*

Sebelum mengimport barang masuk kedalam Laos, Importir di haruskan perusahaannya telah terdaftar dalam sistem Manajemen dan Registrasi Kementerian Industri dan Usaha Komersil Laos.

2. *Prohibited Good*

Memastikan barang yang masuk ke dalam Laos, bukan merupakan barang yang terlarang. Adapun Barang yang termasuk dalam daftar barang yang dilarang untuk diimport masuk ke Laos adalah senjata, narkotika, psikotropika, dan bahan kimia berbahaya.

3. *Import License*

Untuk jenis barang tertentu, harus memiliki surat izin yang di keluarkan oleh DIMEX (*Decree of Import and Export*) atau MOIC (*Ministry of Industry and Commerce*). Tergantung dari produknya, bisa saja berstatus *Automatic* atau *Non-Automatic*. Status *Automatic* di berikan kepada produk apapun asalkan produk tersebut melewati persyaratan hukum dengan status normal. Sedangkan status *Non-Automatic* di berikan tergantung dari penilaian yang dibuat oleh DIMEX itu sendiri. Biasanya status ini berlaku jika suatu produk terbukti melewati kuota import.

Adapun untuk daftar produk yang termasuk dalam *Automatic Licensing* dan *Non-Automatic Licensing*, akan di tampilkan oleh tabel berikut:

Tabel 3.3:

Daftar Barang dalam Import License Laos

<i>Automatic Import Licensing</i>	<i>Non-Automatic Import Licensing</i>
<i>Road vehicles, except road vehicles with three wheels (87.04.31)</i>	<i>Guns and bullets for sportive purposes</i>
<i>Petroleum and Gas</i>	<i>Explosives used in industries:</i> - <i>explosives;</i> - <i>explosive equipment;</i> - <i>explosive objects;</i> - <i>fireworks</i>
<i>Logs, trunks, barks and rough-processed timber</i>	<i>Gold bars (only for gold bars as internationally recognized as medium of payment)</i>
<i>Rice, Rice in the husk, husked (brown) rice, semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed</i>	
<i>Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel; other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot- drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling; Other bars and rods of iron or non-alloyed steel; Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel</i>	
<i>Cement, mortar, concrete</i>	
<i>Publications</i>	
<i>Minerals and mineral products</i>	
<i>Timber exploitation machines, logging machines, chain saws including parts and equipments thereof</i>	

Sumber: List on Goods subject to Automatic and Non-automatic Import Licensing, (<http://laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=76>)

Jika dilihat dari tabel di atas, barang yang harus melalui seleksi *import license* di Laos merupakan mineral serta hasil tambang lainnya. Barang tambang dan mineral yang berbahaya (bahan peledak) serta sensitif (emas batangan), harus melalui *non-Automatic import License*, sebab dibutuhkan penanganan khusus serta melalui proses manual.

4. Sanitary and Phytosanitary

Jika barang yang akan diimport termasuk dalam kategori *sanitary/phytosanitary* , maka harus mematuhi peraturan khusus yang berkaitan dengan produk tersebut. Tabel berikut menunjukkan produk yang termasuk dalam kategori *sanitary and Phytosanitary*:

Tabel 3.4:

Daftar Barang dalam *Sanitary and Phytosanitary*

Jenis Produk / Barang	Izin di keluarkan oleh
<i>Certificate requirement - Animal Feed Product ; Import permit for import of Specimens of Fish for scientific purposes ; Packaging Requirement - Fertilizer ; Phytosanitary certificate requirement - Plant Seeds ; Requirement to obtain Phytosanitary Certificate from Exporting Country - Cassava Planting Material ; Requirement to obtain Phytosanitary Certificate from Exporting Country - Young Plant and Rubber Seed ; Requirement to obtain Phytosanitary Certificate from original country for Import of Plants ; Requirement to obtain Veterinary Certificate from Exporting Country - animals, animal products and/or animal related items ;</i>	<i>Ministry of Agriculture and Forestry</i>
<i>Composition of Ingredients in Iodized Salt ; Food Processing and production requirement ; Hygiene for Drinking Water in Closed Container ; Hygienic Requirement - Food ; Microbiological of Drinking Water in Closed Container ; Quality Certificate requirement for imported food and food products ; Storage requirement - Food ; Substances added in Imported Food ; Substances contain in Drinking Water in Closed Container</i>	<i>Ministry of Health</i>

Sumber: Laos Trade Portal,
(<http://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=searchMeasures/index&types=1>)

Laos telah memberlakukan SPS *Enquiry Point* yang berdasarkan pada WTO SPS *Agreement* yaitu peraturan yang mengatur mengenai barang mana saja yang termasuk dalam kategori *Sanitary and Phytosanitary*. Jika suatu barang tidak terkena lisensi seperti yang di atas,

ataupun tidak termasuk dalam *sannitary/phitosanitary*, produk tersebut dapat langsung dilaporkan ke bagian Bea Cukai.

5. *Technical Requirements*

Untuk jenis produk tertentu, di perlukan untuk mendapatkan izin yang menyatakan bahwa produk ini sesuai dengan standar teknis tertentu. Izin mengenai *Technical Requirements* ini diberikan oleh Departemen Ilmu dan Teknologi Laos. Laos sendiri telah membentuk TBT *Enquiry Point* yang di dasarkan pada TBT WTO *Agreements*. Adapun mengenai rincian produk yang termasuk dalam TBT *Enquiry Point* yaitu, bahan bakar (*fuel*), semen dan bahan konstruksi lain, dan barang-barang elektronik.

6. *Import Declaration*

Pernyataan Import dibuat dengan mengirimkan formulir ACDD yang sudah ditandatangani dan dilengkapi dengan minimum dokumen pendukung sebagai berikut:

- Faktur komersial atau kontrak dokumen penjualan dari pemasok barang
- Dokumen transportasi seperti *Bill of Lading* atau *Air Way Bill*
- Daftar kemasan (jika tersedia)
- Sertifikat asal barang.

Lisensi impor dapat diperoleh dari kementerian lain tergantung pada jenis barang yang akan masuk ke Laos, sebagaimana telah di paparkan di atas.

7. *Classification dan Value*

Setelah barang melewati prosedur di atas, barang akan di tentukan seberapa besar nilai hambatan tarif atau bea yang harus dibayarkan importir untuk dapat memasarkan barang atau produknya di Laos. Besaran biaya bea cukai bervariasi sesuai dengan komoditas serta negara barang berasal. Untuk konteks ASEAN, Laos telah menetapkan hambatan tarif sebesar 0,47% bagi barang-barang import yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN.

8. *Payment of Duties*

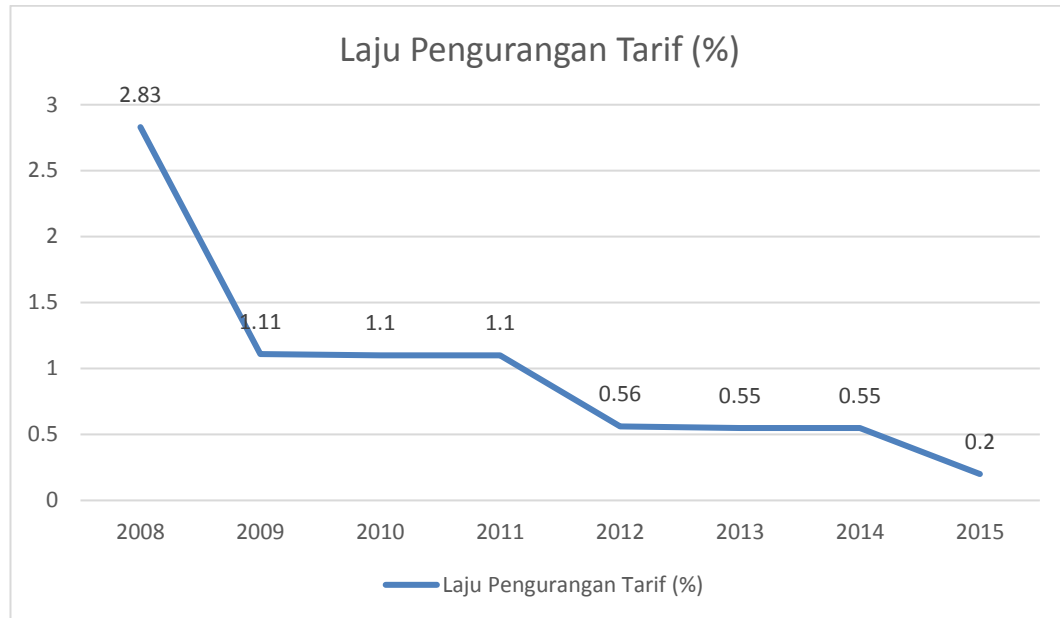
Setelah di tentukan besaran nilai bea barang yang diterima, importir diharuskan membayarkan biaya bea tersebut.

c. Myanmar

Seperti halnya dengan dua negara CLMV sebelumnya di atas untuk menjelaskan laju pengurangan tarif barang masuk kenegara Myanmar akan di gambarkan oleh grafik berikut dibawah ini. Grafik di bawah ini akan menunjukkan perkembangan pemberlakuan hambatan tarif di Myanmar dari tahun 2008 hingga tahun 2015:

Grafik 3.3:

Laju Pengurangan Hambatan Tarif Myanmar Tahun 2008-2015



Sumber: CEPT-ATIGA Tariff Rates 1993-2015, (http://www.asean.org/storage/images/2015/april/information_on_average_tariffs/average%20CEPT-ATIGA%20tariff%20rates%201993-2015_1.pdf)

Tahun pertama pengurangan tarif di Myanmar, terjadi secara sangat signifikan, dari angka 2,83% turun ke 1,11%. Namun sangat di sayangkan tahun-tahun selanjutnya laju pengurangan tarif tersebut sempat mengalami stagnansi. Adapun penurunan tarif yang terjadi selanjutnya tidak begitu signifikan. Akan tetapi, jika kita membandingkan Myanmar dengan negara-negara CLMV yang lain, Myanmar lah yang sampai saat ini memiliki nilai hambatan tarif paling rendah, yaitu sebesar 0,2%.

Berdasarkan aturan dan peraturan yang berlaku di Myanmar, semua kiriman masuk barang import harus melalui Departemen Bea Cukai Myanmar,

dan harus memiliki Deklarasi Impor. Bentuk deklarasi Import harus disertai dengan dokumen sebagai berikut²²:

- Lisensi / izin import
- Faktur
- *Bill of Lading* atau *Air Consignment Notes*
- *Packing List*
- Sertifikat dan izin yang dikeluarkan oleh Departemen Pemerintah yang relevan sebagai syarat untuk import lainnya.

Kemudian importir membayarkan bea yang sesuai dengan jadwal tarif. Bea masuk juga dikenakan basis pajak, dan nilai wajib pajak, yaitu sebesar 0,5% dari nilai barang. Maka jika di akumulasi, barang import dikenakan biaya basis pajak, nilai wajib pajak yaitu sebesar 0,5%, serta bea masuk barang. Untuk negara-negara anggota ASEAN, Myanmar memberlakukan biaya bea masuk barang sebesar 0,2%.

Adapun kategori-kategori tertentu yang menyangkut sertifikat serta surat izin barang yang harus dilalui oleh barang import yang akan masuk ke Myanmar, yaitu :

1. *Testing, Inspection and Quarantine measures*

Tabel di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan daftar komoditi serta barang yang akan terkena kebijakan *Testing, inspection and Quarantine* jika masuk ke Myanmar:

²² Import Procedure, (<http://www.myanmarcustoms.gov.mm/importprocedure.aspx>), diakses pada 5 Mei 2015

Tabel 3.5:

Daftar Komoditi yang terkena *Testing, Inspection, andd Quarantine*

Kategori Produk	Produk
<i>Agricultural crops</i>	<i>rice and rice products, beans and pulses, maize, sesame, oil cakes and other agriproducts, chilly, onion, ginger etc</i>
<i>Forestry products</i>	<i>rubber, cane/rattan, bamboo and its products</i>
<i>Mineral products</i>	<i>petroleum coke etc</i>
<i>Manufacturing products</i>	<i>fertilizer, glasses and cement etc</i>
<i>Animal Products</i>	<i>hides & skins, duck feather, bones and horns etc</i>
<i>Marine Products</i>	<i>fish and prawn, live-crabs etc</i>
<i>Fruits and vegetables</i>	<i>such a mangoes, apples, limes, lychee etc</i>
<i>Machinery and its spare parts</i>	
<i>Food stuff and general commodities</i>	<i>cooking oil, wheat, cashew nut and preserved mango etc</i>
<i>Lubricants</i>	<i>Raw oil, fuel oil</i>
<i>Motor vehicle and its spare parts</i>	
<i>Construction and project bridge materials</i>	
<i>Electrical goods</i>	
<i>Textile goods and Handicraft product</i>	
<i>Dairy products</i>	<i>Condensed milk, evaporated milk etc</i>
<i>Palm Oil (In bulk and in drums)</i>	
<i>Industrial oil for making soap (in bulk)</i>	

Sumber: Myanmar Inspection and Testing Ltd (MITS),
<http://www.commerce.gov.mm/en/article/myanmar-inspection-testing-services-ltd-mits>

Untuk permasalahan menguji serta memeriksa barang import yang akan masuk ke dalam negerinya, akan terlebih dahulu di uji oleh Myanmar *Inspection and Testing Services Ltd* (MITS). Adalah sebuah perusahaan yang diakui oleh pemerintah, yang berada di bawah Departemen

Perdagangan Myanmar. Perusahaan ini memberikan jasa inspeksi komoditas. Perusahaan inilah yang kemudian secara independent berhak memberikan sertifikat lulus inspeksi bagi komoditas yang akan masuk ke Myanmar. Karena Perusahaan ini merupakan layanan jasa, maka importir harus membayar biaya inspeksi, survey serta uji komoditas tersebut. adapun komoditas yang di uji oleh MITS ini adalah sebagai berikut:

2. *Automatic Licensing*

Sebelum Mei tahun 2012, myanmar masih menerapkan sistem *Non-Automatic licensing*. Saat pemberlakuan sistem ini, setiap permohonan izin import bisa saja di tolak oleh Departemen Perdagangan Myanmar dengan berbagai alasan. Namun, semenjak Juni 2012 saat rezim berganti, sistem *non-Automatic Licensing* telah di gantikan dengan sistem *Automatic Licensing*. Dengan sistem ini kemudahan perizinan sangat dirasakan oleh importir, sebab izin bisa dikeluarkan dalam waktu 24 jam.

Sejak February 2013, Departemen Perdagangan Myanmar akhirnya menghapus persyaratan perizinan bagi 152 komoditi ekspor, dan 166 komoditi import. Penghapusan persyaratan perizinan ini dilakukan hanya bagi komoditas yang termasuk dalam kategori *Non-sensitive commodities*. Namun disisi lain, pemerintah masih mempertahankan persyaratan perizinan bagi komoditas yang termasuk kategori *Sensitive List*, seperti gas alam, beras, kayu dan beberapa komoditas lain.

3. *Technical Barriers to Trade (TBT) and Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measure*

Di Myanmar, untuk permasalahan TBT dan SPS *measures* memiliki standar serta regulasi yang sebagian besar merupakan standar internasional. Seperti standar makanan yang diadopsi dari CODEX. Standar perikanan di dasarkan pada peraturan Uni Eropa. Standar dan peraturan farmasi yang berdasarkan *British international Standards*.

4. *Prohibition on Importation*

Adapun produk yang dilarang untuk diimport masuk ke Myanmar adalah sebagai berikut:

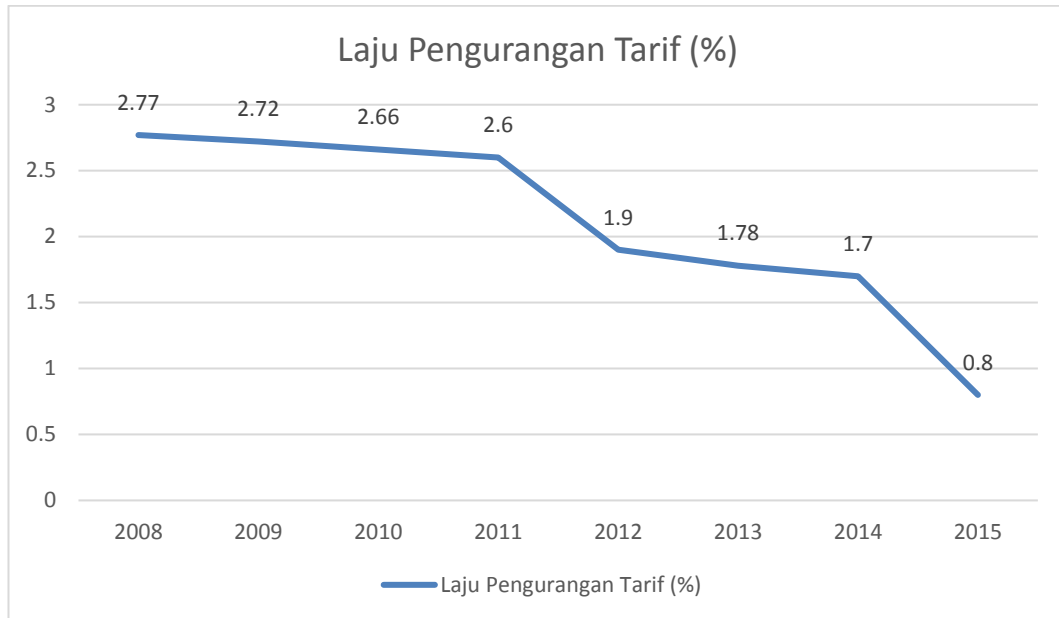
1. *Counterfeit coins and currencies*
2. *Pornographic articles*
3. *Piece goods without stamped measurement*
4. *Goods having counterfeit trade mark*
5. *All kinds of narcotic drugs and psychotropic substances*
6. *playing cards*
7. *Goods bearing the imprint or reproduction of the flag of the Union of Myanmar*
8. *Goods bearing the emblem of Buddha and pagodas of Myanmar*

d. Vietnam

Berikut di bawah ini adalah informasi mengenai laju pengurangan tarif barang masuk yang berlaku di Vietnam:

Diagram 3.4:

Laju Pengurangan Hambatan Tarif Vietnam Tahun 2008-2015



Sumber: CEPT-ATIGA Tariff Rates 1993-2015, (http://www.asean.org/storage/images/2015/april/information_on_average_tariffs/average%20CEPT-ATIGA%20tariff%20rates%201993-2015_1.pdf)

Dari data yang disajikan di atas, terlihat bahwa Vietnam secara konsisten setiap tahunnya terus melakukan pengurangan tarif akan barang masuk ke negaranya. Meskipun tidak begitu signifikan di setiap tahunnya, tapi konsistensi jelas terlihat oleh Vietnam. Seperti negara-negara CLMV yang lain, Vietnam berhasil mengurangi tarif hambatannya hingga di bawah 1%.

Mengenai permasalahan birokrasi import ke dalam Vietnam, pemerintah Vietnam memberlakukan prosedur tertentu, yaitu²³:

²³ Understanding Vietnam's Import and Export Regulation, (<http://www.vietnam-briefing.com/news/understanding-vietnams-import-export-regulations.html/>), diakses pada 4 Mei 2016

1. Prosedur Perizinan Import

Untuk melakukan perdagangan, perusahaan-perusahaan di Vietnam tidak diharuskan memiliki izin import atau eksport. Namun, untuk dapat melakukan kegiatan import ataupun eksport, investor asing diharuskan mendaftarkan perusahaan mereka ke *Departement of Planning and Investment (DPI) of Vietnam*. Selain itu, perusahaan asing juga diharuskan memiliki Sertifikat investasi untuk dapat melakukan kegiatan import ataupun eksport.

Ada barang-barang tertentu yang tidak boleh di eksport ataupun di import oleh perusahaan asing di Vietnam. Perusahaan asing dilarang untuk mengeksport minyak bumi. Dan di larang mengimport cerutu, tembakau, minyak bumi, koran dan jurnal serta pesawat. Ada juga barang-barang tertentu yang memerlukan izin dari pemerintah sebelum di import oleh perusahaan (asing maupun lokal). Seluruh barang-barang import harus telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyangkut karantina produk, keamanan makanan, serta standar kualitas barang. Dan juga barang atau komoditas import harus di periksa oleh pihak yang terkait sebelum memasuki pihak bea cukai Vietnam.

2. *Import Duties*

Sebagian besar barang eksport akan di bebaskan dari bea dan pajak. Hanya beberapa item yang dikenakan, seperti mineral, hasil hutan dan besi tua. Sementara untuk urusan import, terutama barang-barang konsumsi,

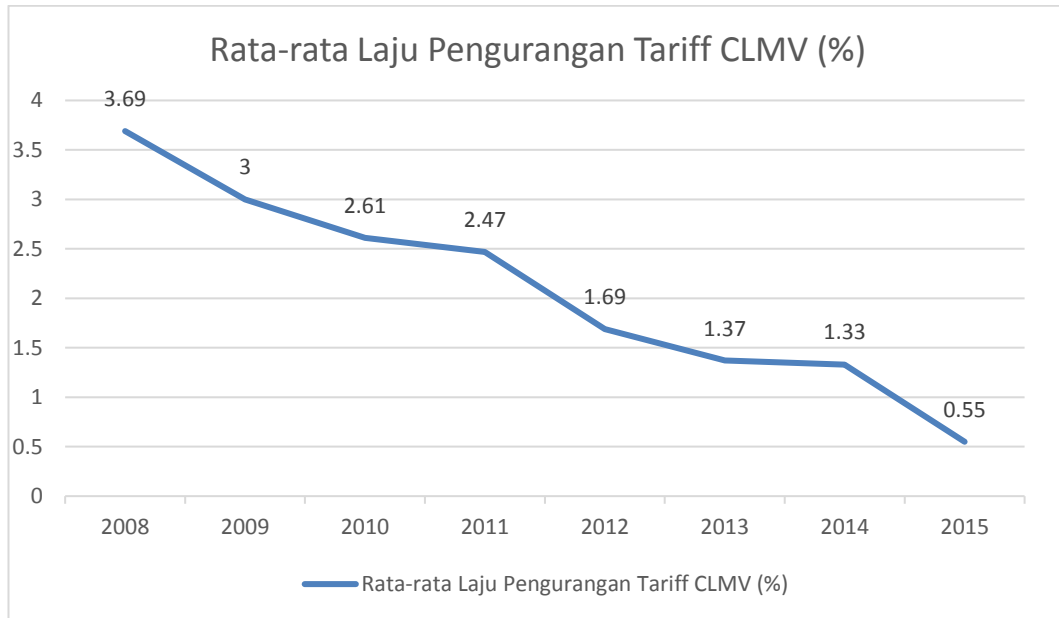
barang-barang mewah akan dikenakan pajak yang tinggi. Sementara mesin, peralatan bahan serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk produksi, terutama barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, akan mendapatkan pajak yang lebih rendah, bahkan nol persen. Ada tiga jenis pajak bea yang diterapkan oleh Vietnam, yaitu *preferential rates*, *special preferential rates*, dan *standard rates*. Hal ini tergantung dari mana negara asal barang import tersebut.

Preferential rates diterapkan bagi barang yang berasal dari negara, kelompok negara, atau wilayah yang menjadikan Vietnam sebagai negara mitra dagang utama mereka. *Special Preferential rates* diterapkan bagi barang yang berasal dari negara, kelompok negara, atau wilayah yang telah melakukan kesepakatan khusus mengenai pajak import dengan Vietnam. Sementara *Ordinary Tax rates* diterapkan bagi barang yang berasal dari negara, kelompok negara atau wilayah yang tidak termasuk dalam kedua kategori tarif bea sebelumnya. *Ordinary Tax rates* ini biasanya dikenakan pajak bea 70% lebih tinggi, yang besarnya ditentukan oleh pemerintah.

Jika kita rata-ratakan laju pengurangan tarif yang dilakukan oleh negara-negara CLMV, kita dapat menemukan angka yang akan ditunjukkan oleh grafik berikut:

Grafik 3.5:

Rata-rata laju Pengurangan hambatan Tariff CLMV 2008-2015



Sumber: CEPT-ATIGA Tariff Rates 1993-2015, (http://www.asean.org/storage/images/2015/april/information_on_average_tariffs/average%20CEPT-ATIGA%20tariff%20rates%201993-2015_1.pdf)

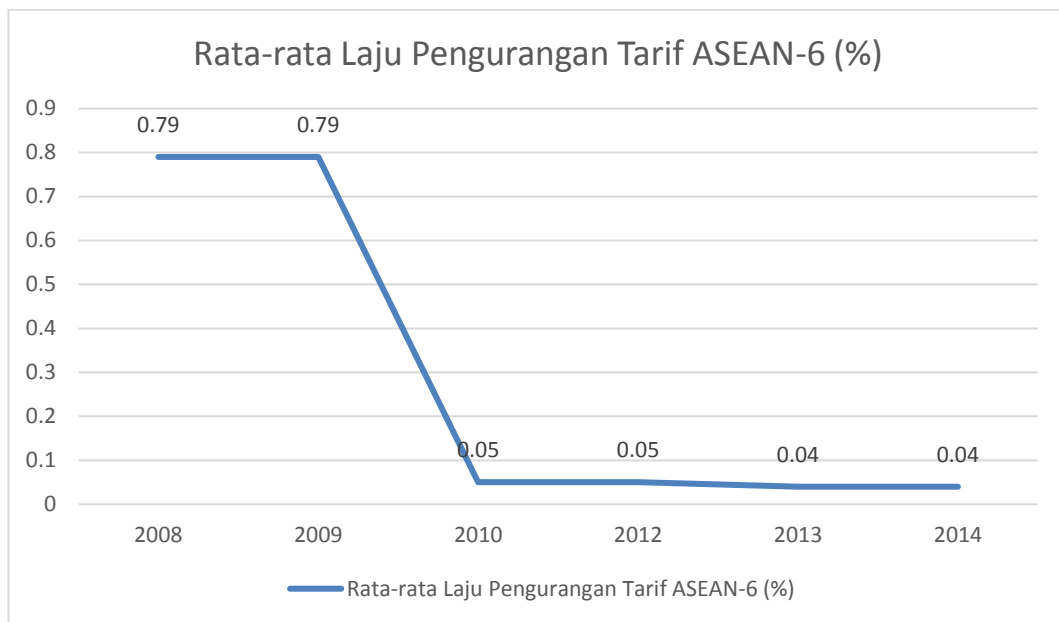
Data rata-rata laju pengurangan hambatan tarif di atas, merupakan hasil akumulasi dari penetapan hambatan tarif CLMV di setiap tahunnya. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa negara CLMV yang di tahun tertentu tidak mengurangi tarifnya, seperti Cambodia dan Myanmar. Ataupun bahkan menaikkan hambatan tarifnya seperti Cambodia dan Laos. Akan tetapi angka positif di tunjukkan oleh rata-rata pengurangan hambatan tarif tersebut, karena trend pengurangan hambatan tarifnya di setiap tahunnya selalu mengalami penurunan.

Bukan hanya negara-negara CLMV yang mengurangi hambatan tarif di negara mereka, tetapi negara-negara ASEAN-6 pun turut melakukannya. Hal ini

tentu saja terkait dengan kesiapan menghadapi *ASEAN Economic Community*. Berikut grafik dibawah ini merupakan angka rata-rata pengurangan tarif negara-negara ASEAN-6:

Grafik 3.6:

Rata-rata laju Pengurangan Hambatan Tariff ASEAN-6 2008-2015



Sumber: CEPT-ATIGA Tariff Rates 1993-2015, (http://www.asean.org/storage/images/2015/april/information_on_average_tariffs/average%20CEPT-ATIGA%20tariff%20rates%201993-2015_1.pdf)

Terlihat jelas bagaimana rata-rata pengurangan tarif yang terjadi di negara ASEAN-6. Bahkan sejak tahun pertama *AEC Blue Print* di sepakati dan dijalankan bersama, tariff barang masuk yang berlaku di negara-negara tersebut telah berada di bawah 1%, lebih tepatnya 0,79%. Bahkan di tahun 2010, ASEAN-6 telah mendekati pengurangan tarif 0%. Dengan pemberlakuan tarif yang begitu rendah, ASEAN-6 telah siap dalam menjalankan *free trade* di tingkat kawasan.

C. Perkembangan Kondisi Perekonomian CLMV pada Sektor Implementasi

AEC Blue Print

Untuk melihat laju perkembangan perekonomian negara-negara CLMV, khususnya lagi pada pillar *free flow of goods*, adalah dengan melihat jumlah perdagangan barang mereka dengan negara-negara Intra ASEAN. Berikut adalah sajian data jumlah perdagangan CLMV dengan negara Intra ASEAN.

a. Cambodia

Tabel 3.6:

Angka Hasil Perdagangan Cambodia Intra ASEAN (dalam Juta US Dollar)

Tahun	Eksport	Import	Total
2008	311	1,599	1910
2009	645	1,453	2098
2010	703	1,682	2385
2011	834	2,170	3004
2012	990	4,152	5142
2013	1301	2,818	4119
2014	1656	8,749	10405

Sumber : ASEAN International Merchandise Trade Statistic Yearbook 2014, (http://asean.org/?static_post=asean-international-merchandise-trade-statistics-yearbook-2014)

Dari sajian data perdagangan di atas salah satu yang perlu kita lihat adalah, di setiap tahunnya, terjadi peningkatan nilai eksport barang Cambodia. Meskipun di lain sisi nilai import terjadi secara fluktuatif. Namun yang paling penting adalah, total transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Cambodia selalu meningkat disetiap tahunnya.

b. Laos

Tabel 3.7:

Angka hasil Perdagangan Laos Intra ASEAN (dalam Juta US Dollar)

Tahun	Eksport	Import	Total
2008	724	1,491	2215
2009	997	1,481	2478
2010	1,151	1,426	2577
2011	960	1,571	2531
2012	1,170	1,167	2337
2013	1,234	2,495	3729
2014	1,505	4449	5954

Sumber : ASEAN International Merchandise Trade Statistic Yearbook 2014, (http://asean.org/?static_post=asean-international-merchandise-trade-statistics-yearbook-2014)

Berbeda dengan negara Cambodia yang dimana jumlah eksport negaranya secara konsisten terus meningkat, bagi Laos nilai eksport dan import disetiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi. Akan tetapi cita-cita penghapusan hambatan perdagangan yaitu meningkatnya angka total transaksi perdagangan juga turut terjadi di Laos. Meskipun peningkatan angka transaksi dagang tersebut tidak begitu signifikan disetiap tahunnya. Bahkan di tahun 2012 angka perdagangannya masih lebih rendah dari tahun sebelumnya. Namun hal itu tidak berlangsung lama, sebab di tahun berikutnya yaitu di tahun 2013, total transaksi perdagangan Laos intra ASEAN kembali meningkat, sejalan dengan makin di hapuskannya hambatan perdagangan.

c. Myanmar

Tabel 3.8:

Angka hasil Perdagangan Myanmar Intra ASEAN (dalam Juta US Dollar)

Tahun	Eksport	Import	Total
2008	3,853	1,728	5581
2009	3,197	2,066	5263
2010	3,740	1,993	5733
2011	3,957	3,250	7207
2012	3,399	4,126	7525
2013	5,625	4,244	9869
2014	4,151	8,107	12258

Sumber : ASEAN International Merchandise Trade Statistic Yearbook 2014, (http://asean.org/?static_post=asean-international-merchandise-trade-statistics-yearbook-2014)

Hampir sama dengan Cambodia dan Laos, total nilai transaksi dagang di Myanmar juga mengalami peningkatan secara konsisten di setiap tahunnya.

d. Vietnam

Tabel 3.9:

Angka hasil Perdagangan Vietnam Intra ASEAN (Dalam Juta US Dollar)

Tahun	Eksport	Import	Total
2008	10,018	19,477	29,495
2009	8,555	13,567	22,122
2010	10,334	16,345	26,679
2011	13,505	20,793	34,298
2012	17,446	20,875	38,321
2013	18,179	21,353	39,532
2014	19,570	24,640	44,210

Sumber : ASEAN International Merchandise Trade Statistic Yearbook 2014, (http://asean.org/?static_post=asean-international-merchandise-trade-statistics-yearbook-2014)

Jika kita melihat data perdagangan di atas, jika di dibandingkan dengan negara CLMV yang lain, hanya Vietnam lah yang mampu menorehkan angka perdagangan hingga puluhan ribu juta US Dollar. Namun jika kita melihat

besarnya nilai angka perdagangan Vietnam terjadi penurunan di tahun 2009. Hal ini tidak begitu menjadi masalah sebab, nilai perdagangan di tahun-tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan data-data serta fakta di atas, yang kemudian di analisis dengan konsep yang telah pula di tuliskan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar, hampir seluruh negara-negara CLMV dapat dikatakan siap untuk menghadapi *ASEAN Economic Community*, bahkan sebelum masa tenggat waktu fleksibilitas yang diberikan habis di tahun 2018. Akselerasi yang cepat dalam menghapuskan hambatan perdagangan diperlihatkan oleh beberapa negara CLMV.

Seperti Cambodia yang telah mengimplementasikan hambatan tarif 0,72%. Angka yang sangat rendah untuk pemberlakuan kebijakan hambatan tarif. Dan juga Cambodia telah memenuhi seluruh point penting pengimplementasian hambatan non-tarif menurut ASEAN NTB (*non-tariff barriers*). Negara Laos juga telah mengimplementasikan hambatan tarif yang rendah yaitu 0,47%. Implementasi hambatan non-tarifnya pun telah sesuai dengan ASEAN NTB.

Sama halnya dengan Myanmar. Hambatan tarif yang diberlakukan di negara tersebut menyentuh angka 0,2%. Penerapan hambatan tarif terendah di antara negara-negara CLMV. Penerapan hambatan non tarifnya pun telah memenuhi seluruh ketentuan didalam ASEAN NTB.

Begitu pula dengan Vietnam. Negara Vietnam telah memberlakukan hambatan tarif 0,8%. Dan telah mengimplementasikan seluruh ketentuan ASEAN NTB dalam hal penghapusan hambatan non-tarif.

2. Peluang yang dimiliki oleh negara-negara CLMV didalam perputaran perdagangan bebas ASEAN *Economic Community* di peroleh dari potensi pasar mereka dalam kawasan Asia Tenggara. Potensi pasar ini dilihat melalui negara mitra dagang negara-negara CLMV yang sebagian besar merupakan negara-negara dari kawasan Asia Tenggara. Seperti Laos yang menjadikan mitra dagang utama, ekspor dan importnya yaitu Thailand dan Vietnam. Myanmar sendiri yang bermitra dagang utama dengan Thailand, Malaysia, Indonesia dan Singapura.

Kondisi berbeda dialami oleh Vietnam, yang dimana mitra dagang utamanya dilakukan dengan Tiongkok. Namun dengan melihat Cambodia serta Laos yang menjadikan Vietnam sebagai mitra dagang utama, sudah cukup bagi Vietnam untuk memastikan potensi pasarnya di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi bagi Cambodia, pasar ekspor di kawasan Asia Tenggara merupakan sebuah tantangan baginya, sebab dari trend perdagangan Cambodia menunjukkan, ekspor ke Asia tenggara bukan merupakan tujuan ekspor utama Cambodia.

Adanya program *Initiatif for ASEAN Integration Work Programme* (IAI-WP), yang merupakan program bantuan teknis dari negara ASEAN-6 untuk membantu proses akselerasi integrasi CLMV dalam AEC kemudian

menjadi peluang tersendiri bagi negara-negara CLMV. IAI-WP ini telah di jalankan selama 12 tahun hingga tahun 2015 dan berjalan efektif.

Tantangan besar yang secara umum dihadapi kedepan oleh negara-negara CLMV adalah dengan memperbaiki produk eksportnya. Hingga saat ini produk eksport setiap negara CLMV masih berupa *raw goods*. Berbeda dengan produk eksport negara ASEAN lain yang sudah merupakan barang setengah jadi maupun barang jadi. Memperbaiki perindustrian didalam negeri agar dapat mengolah *raw good* dan memproduksi barang setengah jadi maupun barang jadi menjadi tantangan bagi CLMV.

Negara-negara CLMV di tuntut ntuk mempercepat kesiapannya masing-masing agar integrasi ekonomi didalam kawasan dapat dicapai. Dengan terintegrasinya kawasan secara ekonomi, akan menjadi modal besar bagi kawasan untuk bersaing didalam perekonomian secara global.

2. Saran-saran

1. Kemampuan eksport suatu negara, menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi hambatan perdagangan. CLMV harus dapat meningkatkan kemampuan eksport, dan mengurangi selisih perdagangan dari import. Jika selisih eksport telah lebih tinggi ketimbang import, CLMV tidak perlu ragu untuk menghapuskan hambatan perdagangannya, baik itu hambatan tarif maupun non tarif.

2. Kualitas produk tentu saja juga berpengaruh terhadap proses perdagangan internasional. Saat ini CLMV hanya mampu memproduksi dan mengekport *raaw goos*. Memperbaiki perindustrian dalam negeri merupakan kunci agar negara-negara CLMV dapat bersaing dengan negara ASEAN lain yang telah memproduksi dan mengekспорт barang setengah jadi dan barang jadi.

Daftar Pustaka

Buku

- Adolf, Huala, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi Keempat, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Burchill, Scott, 2005, *The National Interest in International Relations Theory*, London; Palgrave Macmillan.
- Burmansyah, Edy, 2014, *Rezim Baru ASEAN*, Jakarta: Pustaka Sempu
- Daeng, Salamuddin, 2008, *Makro Ekonomi Minus. Sebuah Tinjauan Kritis Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Institute for Global Justice.
- Ikbar, Yanuar, 2007, *Ekonomi Politik Internasional 2*, Bandung: Refeika Aditama.
- Jackson, Robert & Georg Sorensen, 2009, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, & Marc J. Melitz, 2012, *International Economics: Theory and Policy*, Edisi Kesembilan, Boston: Addison Wesley.
- Mantra, Dodi, 2011, *Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme, Menelusuri Langkah Indonsia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Bekasi: MantraPress.
- Mas' oed, Muchtar, 2008, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Sudirman Arfin, Deasy Sylvia & Nuraeni S., 2010, *Regionalisme Dalam Sudi Ilmu Hubungan Inernasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tunggal, Aprilia Restuning, 2013, *Ilmu hubungan Internasional*, Yogyakarta: Graha Imu.
- Wulyandari Ganewati, Dhorudin Mashad, Tri Nuke Pujiastuti & Athiqah Nur Alami, 2008, *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Internet:

ASEAN Secretariat, 2014, *Mid-Term Review of the Implementation of the IAI Work Plan II 2014*, di unduh di <http://www.aadcp2.org/file/IAIMTRTechnicalAnnexes.pdf/> diakses pada tanggal 24 juni 2016.

ASEAN Secretariat, 2015, *CEPT-ATIGA Tariff Rates 1993-2015*, di unduh di http://www.asean.org/storage/images/2015/april/information_on_average_tariffs/average%20CEPT-ATIGA%20tariff%20rates%201993-2015_1.pdf diakses pada 29 Juni 2016.

Departemen Luar negeri Republik Indonesia. 2009, *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN*, di unduh di <http://www.aeccenter.kemendag.go.id/media/176978/cetak-biru-komunitas-ekonomi-asean.pdf> , diakses tanggal 8 Februari 2015.

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2010, *Buku Menuju ASEAN Economic Community 2015*, di unduh di <http://www.ubk.ac.id/jurnal/JURNAL%20IUS%20FACTI-2015.pdf> diakses pada tanggal 10 Februari 2015).

Lao People's Democratic Republic, 2011, *National Eksport Strategies (NES)*, di unduh di <http://www.laoftpd.com/attachments/article/222/National%20Export%20Strategy%202011-2015%20in%20English%20version.pdf>, diakses pada 14 Agustus 2016.

“*Mengenal Pasar Kerja Laos*”, dalam <http://www.infokerja-jatim.com/artikel/174>, diakses pada Februari 2016.

“*Mengenal Pasar Kerja Myanmar*”, dalam <http://www.infokerja-jatim.com/artikel/175>, diakses pada Februari 2016.

“*Mengenal Pasar Kerja Vietnam*”, dalam <http://www.infokerja-jatim.com/artikel/172>, diakses pada Februari 2016.

“*Profil Negara Kamboja*”, dalam <http://www.kemlu.go.id/phnompenh/id/pages/kamboja.aspx>, diakses pada Februari 2016.

“ASEAN International Merchandise Trade Statistic Yearbook 2014”, http://asean.org/?static_post=asean-international-merchandise-trade-statistics-yearbook-2014, diakses pada 6 April 2016.

“Commercial Imports”, <http://laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=10>, diakses pada 4 Mei 2016.

“Understanding Vietnam’s Import and Export Regulation”, <http://www.vietnam-briefing.com/news/understanding-vietnams-import-export-regulations.html/>, diakses pada 4 Mei 2016.

“Import Procedure”, <http://www.myanmarcustoms.gov.mm/importprocedure.aspx>, diakses pada 5 Mei 2016.

“ASYCUDA Project”, <http://www.customs.gov.kh/trade-facilitation/customs-automation/>, diakses tanggal 8 Mei 2016.

“Non-Tariff Barriers” http://asean.org/?static_post=non-tariff-barriers, diakses pada tanggal 13 Mei 2016.

“Declarations and Work Plan”, <http://asean.org/asean-economic-community/initiative-for-asean-integration-iai-and-narrowing-the-development-gap-ndg/declarations-and-work-plans/>, diakses pada 24 Juni 2016.

“The Twenty-First Meeting of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council”, http://asean.org/?static_post=the-twenty-first-meeting-of-the-asean-free-trade-area-afta-council-makati-city-philippines-23-august-2007-joint-media-statement, diakses tanggal 26 Juni 2016.

“Initiative for ASEAN Integration (IAI)”, <http://asean.org/asean-economic-community/initiative-for-asean-integration-iai-and-narrowing-the-development-gap-ndg/>, diakses pada 7 Juli 2016.

“Trading Economics”, www.tradingeconomics.com, diakses pada 22 Juli 2016.

“Trade and Custom”, <http://www.cambodiainvestment.gov.kh/investors-information/trade-and-custom.html>, diakses tanggal 13 Agustus 2016.

“Cambodian Rehabilitation and Development Board (CRDB), Kingdom of Cambodia, Trade Policy”, http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/ngo_statement/trade_policy_62.htm, diakses tanggal 13 Agustus 2016.

“Peluang pasar bebas barang dan jasa di ASEAN (Kamboja)”. <http://aeccenter.kemendag.go.id/peluang-produk-jasa-indonesia/internal-asean/kamboja/>, diakses tanggal 13 Agustus 2016.

“Kamboja Pesimis Target Ekspor beras Tercapai”, <http://www.varia.id/2015/02/19/kamboja-pesimis-target-ekspor-beras-tercapai/>, diakses tanggal 13 Agustus 2016.

“Government reveals 12-point economic policy”, <http://www.mmtimes.com/index.php/business/21664-nld-12-point-economic-policy-announcement.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2016.

“Strategy on exports and imports for 2011-2020, with visions to 2030”, <http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/strategies/strategiesdetails%3FcategoryId%3D30%26articleId%3D10052505>, diakses pada 14 Agustus 2016.

